

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI POLUSI DI DLHK KABUPATEN KARAWANG

Elsa Salfira¹, Hanny Purnamasari²

¹Universitas Singaperbangsa
Karawang, Indonesia
elsasalfira28@gmail.com
(corresponding author)

²Universitas Singaperbangsa
Karawang, Indonesia
hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

ABSTRACT

Strategy is essentially a careful plan for an activity to achieve a target or goal, strategy cannot be separated from the goal to be achieved without clear goals, strategy will create new problems, therefore strategy can be formulated after understanding the goal. This research aims to determine the DLHK Communication Strategy in overcoming pollution in Karawang Regency. The research method used by researchers is a descriptive research method with a qualitative approach with data collection techniques by means of observation, interviews and literature study. Meanwhile, the theory for analyzing the object of this research is the communication strategy theory put forward by Hafied Cangara consisting of research, planning, implementation, evaluation and reporting. The results of the research that has been carried out show that the communication strategy of the Karawang Regency Environment and Hygiene Service in dealing with pollution in the five dimensions of the communication strategy stage has succeeded in implementing an effective communication strategy by increasing awareness of the public and entrepreneurs to protect the surrounding environment so that air pollution does not occur.

Keywords: *strategy, policy, environment and hygiene service, pollution*

PENDAHULUAN

Pelayanan pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu krusial, selain persoalan lingkungan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Tugas utama Dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis terkait lingkungan hidup, pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang tersebut, koordinasi antar pemangku kepentingan, pembinaan, serta pengelolaan aspek administrasi, seperti perencanaan, manajemen umum, kepegawaian, dan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang. Prioritas utama adalah meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan fokus pada pengelolaan pencemaran air dan udara, penilaian dokumen lingkungan, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, serta mitigasi dampak perubahan iklim.

Polusi udara merupakan dampak dari berbagai aktivitas manusia, baik di sektor produksi maupun transportasi, yang menghasilkan limbah berupa emisi. Sumber utama polusi udara mencakup asap kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran sampah yang dilakukan secara terus-menerus, serta emisi yang dihasilkan dari proses industri. Peningkatan jumlah penduduk turut berkontribusi terhadap bertambahnya limbah pencemar udara, yang mengakibatkan akumulasi zat polutan di atmosfer. Kondisi ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan dan penyakit akibat kualitas udara yang buruk (Rosyidah, 2016).

Kabupaten Karawang, sebagai salah satu pusat industri utama di Indonesia, memiliki sejumlah kawasan industri besar, termasuk Kawasan Industri Indotaisei, Kawasan Industri Kujang, Kawasan Industri Mandala Putra, Kawasan Industri KIIC, Kawasan Industri KIM, Kawasan KIJE Karawang Barat, dan Kawasan Industri Suryacipta. Wilayah ini menjadi lokasi bagi sekitar 1.762 pabrik, terdiri dari 787 pabrik swasta, 269 pabrik PMDN, 638 pabrik PMA, dan 58 pabrik joint venture. Tingginya jumlah industri di Karawang memberikan kontribusi signifikan terhadap meningkatnya tingkat polusi udara yang dihasilkan dari aktivitas produksi.

Pada tahun 2023, Karawang mendapatkan predikat sebagai wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Berdasarkan indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI), Karawang mencatat nilai 178 dengan kategori "Sangat Tidak Sehat" (Very Unhealthy). Penilaian ini didasarkan pada konsentrasi partikel PM_{2.5}, yaitu partikel mikroskopis dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang berasal dari asap kendaraan, emisi industri, PLTU, serta pembakaran bahan bakar fosil lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang menerapkan kebijakan pemantauan kualitas udara melalui penggunaan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). ISPU adalah indikator berbentuk angka tanpa satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di suatu wilayah. Penilaian kualitas udara ini didasarkan pada dampaknya terhadap kesehatan manusia, estetika lingkungan, serta keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Secara khusus, di daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, ISPU juga berperan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) bagi masyarakat setempat. Penerapan ISPU bertujuan utama untuk menyediakan informasi kualitas udara yang seragam, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat di lokasi dan waktu tertentu. Selain itu, ISPU menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk mengendalikan pencemaran udara.

Melihat pentingnya isu ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pencemaran udara di Kabupaten Karawang, yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri besar dengan wilayah yang luas. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang ISPU dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 sebagai bagian dari pengelolaan kualitas udara. Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perhitungan, Pelaporan, dan Informasi ISPU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut, khususnya terkait dengan pengendalian pencemaran udara di wilayah

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi pada dasarnya merupakan sebuah rencana yang disusun dengan cermat untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Keberadaan strategi tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai, karena tanpa adanya tujuan yang jelas, strategi justru berpotensi menciptakan tantangan baru. Oleh sebab itu, penyusunan strategi harus dilakukan setelah tujuan dipahami secara mendalam. Secara teoritis, strategi dapat didefinisikan sebagai sebuah seni yang melibatkan kemampuan berpikir

untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada dalam upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagaimana dinyatakan oleh Nounkeu (2020), strategi adalah langkah prioritas yang dirancang oleh sebuah organisasi melalui berbagai pendekatan serta pilihan rencana terbaik demi mencapai misi organisasi. Misi tersebut diwujudkan melalui tiga tahapan utama dalam strategi, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Sasilo et al., 2020).

David Hunger dan Thomas L. Wheelen mendefinisikan strategi sebagai rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang memengaruhi kinerja organisasi dalam jangka panjang. Strategi memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya menyampaikan visi atau tujuan yang ingin dicapai kepada pihak-pihak yang berkepentingan, menghubungkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang yang terdapat di lingkungan eksternal, memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai sekaligus menjajaki peluang baru, mengoptimalkan sekaligus menghasilkan lebih banyak sumber daya guna mendukung tujuan organisasi, mengoordinasikan berbagai aktivitas organisasi untuk menciptakan sinergi di masa depan, serta merespons dan beradaptasi terhadap tantangan atau perubahan yang terjadi. Strategi yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan organisasi, sumber daya yang tersedia, serta kondisi lingkungan internal dan eksternal guna memastikan pencapaian sasaran secara optimal.

Hafied Cangara dalam bukunya *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* mengidentifikasi lima tahapan utama dalam strategi komunikasi, yaitu:

1. Penelitian (Research)

Tahap awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi fakta atau permasalahan yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi komunikasi. Penelitian bertindak sebagai landasan untuk memahami situasi yang dihadapi oleh organisasi atau lembaga, sehingga dapat dirancang strategi yang tepat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Perencanaan (Plan)

Pada tahap ini, perusahaan membuat rencana untuk tindakan strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Pengaturan sasaran strategis, perancangan strategi, dan penentuan komunikator, pesan, media, segmen sasaran, dan hasil yang diharapkan adalah semua bagian dari perencanaan.

3. Pelaksanaan (Execute)

Tahapan ini mengintegrasikan berbagai elemen organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah dirancang. Kegiatan pada tahap ini meliputi berbagai aktivitas komunikasi, seperti penyiaran tayangan di televisi, wawancara radio, pemasangan iklan di surat kabar, baliho, atau spanduk, hingga pengorganisasian tim penyuluhan untuk berinteraksi langsung dengan komunitas sasaran.

4. Evaluasi (Measure)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja strategi komunikasi memenuhi harapan. Penilaian ini mencakup efektivitas media yang digunakan, pencapaian tujuan, pemahaman audiens terhadap pesan yang disampaikan, serta respons atau tindakan audiens setelah menerima informasi.

5. Pelaporan (Report)

Tahap ini melibatkan penyusunan laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk program berikutnya. Jika laporan menunjukkan hasil yang memuaskan, temuan ini dapat dijadikan dasar pengembangan program ke depan. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan, hal tersebut menjadi bahan revisi untuk meningkatkan kualitas program selanjutnya (Linjani, A., 2018).

Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk memastikan strategi komunikasi dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyajikan data tentang fakta-fakta dan fenomena lapangan secara sistematis dan akurat. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dari lokasi penelitian merupakan sumber data primer dari studi ini. Sumber data sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, dokumen resmi yang relevan dengan instansi terkait, dan berbagai literatur yang mendukung topik penelitian. Studi ini melihat strategi kebijakan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas industri yang tinggi. Peneliti mewawancarai karyawan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan untuk memastikan bahwa data itu valid. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan.

PEMBAHASAN

Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Polusi di DLHK Kabupaten Karawang terhadap Dimensi Perencanaan

Perencanaan adalah proses merencanakan dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan. Perumusan diperlukan pada tahap ini, yang mencakup pemilihan komunikator, pesan, media, sasaran, dan efek yang diharapkan. Masing-masing komponen dijelaskan di bawah ini:

a. Komunikator

Dalam proses komunikasi, orang yang bertugas menyampaikan pesan disebut komunikator. Dalam hal ini, seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, terutama yang bekerja di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, berfungsi sebagai komunikator. Mereka bertugas memberikan informasi dan melakukan sosialisasi terkait kebijakan serta program penanggulangan polusi kepada masyarakat dan perusahaan. Kegiatan ini meliputi pembinaan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekitar, serta mengedukasi perusahaan untuk memasang filter atau alat ISPU pada cerobong asap guna mengurangi pencemaran udara yang berbahaya. Dengan demikian, DLHK menjadi komunikator yang strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan perusahaan sesuai bidang dan program masing-masing.

b. Pesan

Pesan adalah keseluruhan informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa informasi yang bersifat persuasif atau edukatif, yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan mendorong perubahan sikap atau perilaku. DLHK Kabupaten Karawang menyampaikan pesan yang berisi informasi terkait mutu udara yang akurat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengendalian pencemaran udara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, pesan juga mencakup edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah pencemaran udara akibat aktivitas sehari-hari. Melalui pesan ini, DLHK berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

c. Media

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada sasaran. DLHK Kabupaten Karawang menggunakan berbagai media, seperti alat pemantau kualitas udara yang dipasang di lokasi tertentu untuk mendeteksi konsentrasi pencemaran. Selain itu, DLHK memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menyebarkan informasi secara luas. Namun, media khusus yang berfokus pada isu polusi udara di Karawang masih belum tersedia. Pemanfaatan media ini bertujuan untuk memastikan pesan dapat diterima secara luas dan tepat oleh target sasaran.

d. Sasaran

Sasaran komunikasi adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Dalam hal ini, sasaran utama DLHK mencakup masyarakat umum, khususnya mereka yang aktivitasnya berpotensi menimbulkan polusi, serta perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi udara dari proses produksi. Selain itu, sasaran komunikasi juga mencakup pemerintah daerah, terutama terkait pencemaran yang bersumber dari aktivitas pengelolaan sampah di TPA. Keterlibatan semua pihak sebagai sasaran komunikasi sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang luas tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan lingkungan.

e. Efek

Efek adalah hasil yang diharapkan dari proses komunikasi, berupa perubahan sikap, pemahaman, atau tindakan dari sasaran. Dalam konteks ini, efek yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan perusahaan mengenai kebijakan serta langkah penanggulangan polusi. Sejauh ini, DLHK Kabupaten Karawang telah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perusahaan melalui edukasi tentang pengendalian pencemaran, yang diharapkan dapat mendorong implementasi langkah-langkah ramah lingkungan. Efek ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas udara dan lingkungan yang lebih baik di Kabupaten Karawang.

Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Polusi di DLHK Kabupaten Karawang terhadap Dimensi Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses yang mencakup penentuan, pengelompokan, dan penugasan individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan lingkungan fisik dan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang menjalankan

berbagai kebijakan dan program untuk menanggulangi polusi udara, khususnya di wilayah dengan aktivitas industri yang tinggi.

Salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan DLHK adalah penerapan alat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang dirancang untuk memantau kualitas udara di berbagai lokasi. Kebijakan ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meminimalisir dampak polusi. DLHK berfokus pada pengawasan lingkungan industri dengan mengupayakan pemasangan alat filter udara pada cerobong asap pabrik agar polusi yang dihasilkan tidak berdampak langsung pada kawasan permukiman.

Selain itu, DLHK juga melakukan evaluasi atas kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk memastikan efektivitasnya. Beberapa kebijakan yang dirasa tidak lagi relevan ditinjau ulang dan diperbarui sesuai kebutuhan. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Namun, upaya untuk menjalankan kebijakan terus dilakukan meski dengan keterbatasan yang ada.

DLHK Kabupaten Karawang juga melakukan berbagai cara untuk mengidentifikasi masalah polusi udara, salah satunya adalah uji emisi kendaraan. Kendaraan yang melebihi baku mutu emisi diberikan rujukan untuk perbaikan agar sesuai dengan standar. Selain itu, pemantauan udara dilakukan menggunakan alat ISPU yang dipasang di dua lokasi, yaitu depan Mega M dan Pemda 2. Alat ini memantau kualitas udara secara real-time dengan parameter seperti PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, CO, O₃, dan HC dalam radius 2–5 km. Namun, jumlah alat yang terbatas menjadi tantangan dalam mendapatkan data yang lebih luas. Idealnya, alat ISPU dipasang di lebih banyak titik, termasuk kawasan ramai seperti Cikampek.

Selain menggunakan ISPU, DLHK juga melakukan pengambilan pasif sampler di beberapa titik, seperti kawasan perumahan, lalu lintas, industri, dan perkantoran. Pengambilan data dilakukan dua kali dalam setahun, dengan dukungan dari DLH Provinsi dan KLHK. Hasil pasif sampler memberikan indeks kualitas udara yang menjadi acuan untuk mengetahui kondisi lingkungan di Kabupaten Karawang.

Dengan berbagai upaya ini, DLHK Kabupaten Karawang terus berkomitmen untuk menanggulangi polusi udara meskipun terdapat berbagai kendala. Kebijakan dan program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup di wilayah tersebut secara bertahap.

Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Polusi di DLHK Kabupaten Karawang terhadap Dimensi Evaluasi

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, mengidentifikasi selisih antara hasil aktual dengan standar atau harapan, serta menganalisis manfaat yang telah diperoleh dibandingkan dengan target yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi didefinisikan sebagai penilaian atau pengumpulan bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu objek, program, atau proses terhadap kebutuhan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama evaluasi adalah memberikan masukan untuk perencanaan, kelanjutan, pengembangan, atau penghentian program, serta memodifikasi kebijakan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan selama pelaksanaan.

Dalam konteks kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, evaluasi dilakukan dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, evaluasi dilakukan dengan menilai apakah target yang ditentukan berhasil dicapai. Jika target belum tercapai, dilakukan analisis terhadap penyebab kegagalan serta identifikasi program-program yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan memantau tren pencapaian apakah menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya.

Hasil dari evaluasi ini kemudian didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan lebih lanjut. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dalam menangani masalah polusi udara di Kabupaten Karawang. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan DLHK untuk memahami faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta memberikan masukan yang konstruktif untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja pelaksana kebijakan.

Melalui evaluasi yang terstruktur, DLHK Kabupaten Karawang tidak hanya dapat mengidentifikasi keberhasilan atau kekurangan dalam kebijakan yang dijalankan, tetapi juga dapat memastikan bahwa setiap langkah perbaikan yang dilakukan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis untuk mengurangi polusi udara di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Strategi kebijakan pemerintah dalam mengatasi polusi yang diterapkan oleh DLHK Kabupaten Karawang, khususnya pada dimensi perencanaan, mencakup strategi dalam pemilihan atau penetapan sumber (komunikator). Dalam hal ini, seluruh pihak yang terlibat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang berperan sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun perusahaan sesuai bidang dan program kerja masing-masing. Pesan yang disampaikan oleh DLHK sebagai komunikator bertujuan memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait kualitas udara di lokasi serta waktu tertentu. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini melibatkan pemantauan dengan alat yang dipasang di berbagai titik strategis. Sasaran komunikasi terkait masalah polusi di Kabupaten Karawang meliputi seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Efek yang diharapkan dari upaya penanggulangan polusi yang dilaksanakan oleh DLHK, terutama dalam bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebijakan yang efektif untuk mengurangi polusi dan menjaga kualitas lingkungan.

Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Polusi di DLHK Kabupaten Karawang Berdasarkan Dimensi Pelaksanaan telah dilakukan dengan Bentuk pelaksanaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Karawang yaitu dengan melaksanakan kebijakan- kebijakan atau program yang telah di buat contohnya seperti adanya penerapan alat ISPU yang bisa mendeteksi lingkungan dari udara disekitar. Lalu pihak DLHK Kabupaten Karawang juga melakukan

pemantauan dengan menggunakan alat yang disebut Indeks Standart Pencemaran Udara (ISPU) di beberapa titik. Kemudian tidak hanya dengan dua cara diatas saja yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Karawang untuk menemukan fakta terkait polusi, namun DLHK juga mengetahui fakta terkait polusi di Kabupaten Karawang dengan cara lain seperti melakukan pengambilan pasif sampler atau keterwakilan di beberapa titik seperti dari perumahan, lalu lintas, industri dan perkantoran. Selain itu ada juga kebijakan lainnya yang berfokus kan kepada kawasan industri yang ada di kabupaten Karawang dengan melakukan pengawasan lingkungan pabrik dengan memprioritaskan alat filter udara agar dapat menyaring udara yang keluar kepermukiman. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan- kebijakan tersebut belum sempurna di laksanakan oleh karena itu masi perlu banyak perbaikan.

Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Polusi di DLHK Kabupaten Karawang Berdasarkan Dimensi Evaluasi bahwa evaluasi dinas lingkungan hidup dan kebersihan di kabupaten Karawang adalah berdasarkan target yang harus dicapai, kaitannya dilihat dari tercapai atau tidaknya target tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dmi. (2023, 09 jumat). *karawang di goyang polusi nomor 1 kota udara terburuk di RI pagi ini*. From cnn indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>
- indeks kualitas udara (AQI) karawang dan polusi udara di indonesia*. (2024, 05). From IQAir: <https://www.iqair.com>
- Lianjani, A. (2018). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Juliawati, D., Febriantini, K., & Kurniansyah, D. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi polusi di dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten karawang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2295-2300.
- Muhamad fakhtullah, i. m. (2023). strategi komunikasi dalam mengatasi perubahan iklim melalui pelibatan masyarakat. *komunikasi pembangunan*, 1-17.
- Muhammad fakhtullah, i. m. (2023, 03 21). strategi komunikasi dalam mengatasi perubahan iklim melalui pelibatan masyarakat. *komunikasi pembangunan*, 1-17. doi:<https://doi.org/10.46937/21202341909>
- Reza argianto, y. (2023). strategi komunikasi dinas lingkungan hidup pelalawan dalam pengendalian pencemaran udara industri di pangkalan kerinci kota kabupaten pelalawan. *ilmu komunikasi dan sosial*, 1-16.
- Reza argianto, y. (2023, 12). strategi komunikasi dinas lingkungan hidup pelalawan dalam pengendalian pencemaran udara industri di pangkalan kerinci kota kabupaten pelalawan. *ilmu komunikasi dan sosial*, 1-16. doi:<https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i4.1592>
- Setiawati, s. (2023, 09 01). *korban polusi , sri mulyani kena ISPA karawang kota terburuk*. From cnbcindonesia: <https://www.cnbcindonesia.com>